RENCANA AKSI TAHUN 2026 BPPKAD KOTA PROBOLINGGO

NO	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Program	Indikator	Target	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Sub.Kegiatan	Indikator	Target	
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah	Persentase OPD yang memiliki kevalidan data aset	Program Pengelolaan Barang Milik	Persentase OPD memiliki kevalidan data OPD	96,8%	Pengelolaan Barang Milik Daerah		85%	Penatausahaan BMD	Persentase BMD yang terinventarisir	90%	Penyusunan data inventarisasi aset daerah;
												Rekonsiliasi dan verifikasi belanja modal masing-masing OPD
												Bimbingan Teknis Pemantapan Kapasitas Pengurus Barang OPD
									Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Perwali Inventarisasi Barang Milik Daerah	80%	Rekonsiliasi update database pada masing-masing OPD
												Asistensi update database ke aplikasi SIASAD
									Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Perwali Standar Satuan Harga	85%	Koordinasi Penyusunan Standar Satuan Harga dengan pihak ketiga
												Penyusunan Perwali Standar Satuan Harga
				Persentase OPD memiliki kevalitan data OPD	96,8%	Pengelolaan Barang Milik Daerah		85%	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Persentase OPD dalam menyusun Rencana Kebutuhan dan	85%	Koordinasi dengan OPD terkait penyusunan Perencanaan Kebutuhan dan Pemeliharaan BMD
												Penyusunan Perwali Perencanaan Kebutuhan dan Pemeliharaan BMD
									Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Perwali Premi Asuransi	90%	Koordinasi penyusunan Premi Asuransi dengan pihak ketiga
												Penyusunan Perwali Premi Asuransi Kendaraan Dinas Jabatan
									Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Persentase OPD dalam melaksanakan proses Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD	70%	Pembuatan Perwali Penghapusan
												Pelaksanaan Pemindahtanganan BMD
												Pelaksanaan validasi dan verifikasi atas penggunaan dan pemanfaatan BMD
												Pelaksanaan / Pembuatan Perjanjian Pinjam Pakai

									Pengamanan Barang Milik Daerah	Persentase Tanah & Bangunan yang disertifikatkan	95%	Pengadaan Patok Tanda Batas Tanah Aset
										Persentase Tanah & Bangunan yang dimanfaatkan sesuai peruntukannya		Pensertifikatan Tanah dan Bangunan
												Pengelolaan Pemanfaatan Sewa Tanah Pertanian
												Pengadaan Papan Identitas Tanah dan Bangunan
2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah	Persentase OPD dengan LKPD yang sesuai ketentuan	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Perangkat Daerah Menyelesaikan Laporan Keuangan yang berkualitas	100%	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah yang tertib	100%	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 dokumen	Kegiatan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
									Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RAPERDA dan RAPERKADA tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 dokumen	Koordinasi dan Penyusunan RAPERDA tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan RAPERKADA tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
									Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	36. laporan	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan laporan-laporan berkala (bulanan, triwulan dan semester)
			Program pengeloaan keuangan Daerah	Perangkat daerah yang Menyelesaikan Laporan keuangan yang berkualitas	100%	Koordinasi dan pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah yang Akuntabel dan tepat waktu	100%	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah	Jumlah SKPD /PPKD yang Melaksanakan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah yang sesuai Aturan	28.SKPD	Pendampingan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
									Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset Kewajiban Ekuitas Pendapatan Belanja Pembiayaan Pendapatan - LO dan Beban	Jumlah SKPD/PPKD yang Melaksanakan Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset Kewajiban Ekuitas Pendapatan Belanja Pembiayaan Pendapatan - LO dan Beban	31 Dokume	Pelaksanaan Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset Kewajiban Ekuitas Pendapatan Belanja Pembiayaan Pendapatan -LO dan Beban

									Koordinasi Penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	17. laporan	Penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
									Koordinasi laporan keuangan SKPKD, BLUD dan laporan Keuangan Daerah	Jumlah kegiatan Koordinasi laporan keuangan SKPKD, BLUD dan laporan Keuangan Daerah	100%	Asistensi Penyusunan laporan Keuangan SKPD dan BLUD
												Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah daerah (unaudited)
												Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah daerahaudited)
									Koordinasi dan penyusunan Rancangan peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Propinsi dan Perencanaan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RAPERDA dan RAKERPADA tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan kepala Daerah Tentang penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kabupaten/Kta	2. Dokumen	Penyusunan Raperda Pertanggungjawaban APBD dan Raperwali Penjabaran pertanggungjawaban APBD
												Penyusunan perda Pertanggungjawaban APBD dan Perwali Penjabaran
									PenyusunanTanggapan/Tindak lanjut terhadap LHP BPK atas laporan pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah DokumenTanggapan/Tindak lanjut terhadap LHP BPK atas laporan pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1. Dokumen	Penyusunan Tanggapan/Tindak lanjut terhadap LHP BPK atas laporan pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
									Penyusunan Analisis laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Analisis laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	1. Dokumen	Penyusunan Analisis laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
									Penyusunan Siistem dan prosedur Akuntansi dan Pelaoparan keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Siistem dan prosedur Akuntansi dan Pelaoparan keuangan Pemerintah Daerah	1. Dokumen	Penyusunan Siistem dan prosedur Akuntansi dan Pelaoparan keuangan Pemerintah Daerah
									Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	1. kegiatan	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota

			Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Perencanaan Anggaran OPD yg Berkualitas	100%	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Prosentase Jumlah PD yg menyusun rencana anggaran tepat waktu	100%	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Prosentase Jumlah PD yang menyusun RKA sebagai penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD tepat waktu	100%	1.Menghimpun dan menelaah petunjuk teknis/pedoman penyusunan penjabaran APBD
												2.Rakor penyusunan penjabaran APBD dengan SKPD
									Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Prosentase Jumlah PD yang menyusun RKAP sebagai penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD tepat waktu	100%	3. Memantau dan mengevaluasi penyusunan penjabaran APBD
												4. Rakor penyusunan Rencana Kerja
												5. Memantau dan mengevaluasi penyusunan RKA SKPD/PPKD sesuai
												6. Rakor penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
												7. Memantau dan mengevaluasi penyusunan DPA SKPD/PPKD sesuai dengan penjabaran APBD
												8. Menghimpun dan menelaah petunjuk teknis/pedoman penyusunan APBD
												9. Rakor penyusunan APBD dengan
												10. Memantau dan mengevaluasi penyusunan APBD
												11. Melaksanakan fasilitasi pendampingan dengan TAPD dalam rangka penyusunan APBD
			Program PengelolaanKeuangan Daerah	PersentasePerencanaanAnggaranPerangkat Daerah yang berkualitas	100%	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Perencanaan Anggaran Perangkat Daerah yang berkualitas	100%	KoordinasidanPenyusunan KUA dan PPAS	Jumlahdokumen KUA-PPAS yang tersusun	2 dokumen	Mengumpulkanbahanrapatkoordinasipenyusunan KUA-PPAS
												Koordinasidengan SKPD terkait
												Menyusunrancangan
												KUA-PPASdengan TAPD
												Membahasrancangan
												kua-ppasbersamaTAPD
												Mengirimkanrancangankua-ppaskekepaladaerah
												Mengirimkanrancangan
												kua-ppaske DPRD
												Pembahasanrancangan KUA-PPAS denganantara DPRD dan TAPD

												MenyesuaikanRancangan KUA-PPAS sesuaihasilkesepakatan DPRD dan TAPD
									KoordinasidanPenyusunanPerubahan KUA danPerubahan PPAS	JumlahdokumenPerubahanKUA-PPAS yang tersusun	2 dokumen	MengumpulkanbahanrapatkoordinasipenyusunanPerubahanKUA-PPAS
												Koordinasidengan SKPD terkait
												Menyusunrancangan
												KUA-PPASbersama TAPD
												MembahasrancanganPerubahankua-ppasdengan TAPD
												Mengirimkanrancanganperubahankua-ppaskekepaladaerah
												Mengirimkanrancanganperubahankua-ppaske DPRD
												Pembahasanrancangan KUA-PPAS denganantara DPRD dan TAPD
												MenyesuaikanRancanganPeruabahn KUA-PPAS sesuaihasilkesepakatan DPRD dan TAPD
			Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Pengelolaan Perbendaharaan dan Kas Daerah yang tepat	75%	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase realisasi gaji dan tunjangan ASN yang tepat waktu.	75%	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Persentase jumlah SKPD yang tertib dalam penatausahaan gaji	90%	1. Melaksanakan penelitian kelengkapan pengajuan gaji SN,KDH dan DPRD setiap bulan 2. Melakukan rekonsiliasi atas mutasi gaji ASN setiap bulan dan perhitungan PFK berbasis IT
									Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Persentase realisasi belanja tidak terduga	70%	Melaksanakan fasilitasi pencairan belanja tidak terduga (BTT)
				Persentase Pengelolaan perbendaharaan dan kas daerah yang Tepat		Koordinasi dan Pengelolaan perbendaharaan daerah				- Persentase Ketepatan Pena	75%	Rekonsiliasi Laporan Perbendaharaan
										Keuangan antara SKPD dan SKPKD		per Bulan (tiap bulan)
							Persentase Pengelolaan Perbendaharaan dan kas Daerah yang tepat			- Persentase GNNT di Pemerintah Kota	75%	Rekonsiliasi Implementasi Transaksi
			ogram Pengelolaan Keuangan Daera		75%			75%	Pembinaan penatausahaan Keuangan pemerintah Kab/Kota	- Persentase Ketepatan Penatausahaan	75%	Non Tunai (Triwulan)
										Keuangan Non RKUD		Rekonsiliasi Realisasi Dana Non RKUD
										- Persentase Ketepatan Penerbitan	85%	(Triwulan)
										SP2D		Rekonsiliasi Penerbitan SP2B
										- Persentase Ketepatan Penerbitan	75%	
										SP2B		
3	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase Kenaikan PAD	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Prosentase Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	15%	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Wajib Pajak Yang Dilayani	1300 WP	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah berkas pelayanan pajak daerah yang diselesaikan	10000 berkas	Penyediaan sarana dan prsarana pengelolaan berkas penetapan pajak daerah
									Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Wajib Pajak Baru	100 WP	Pendataan dan penerbitan objek dan subjek pajak daerah
												Pemungutan pajak dan piutang pajak daerah
									Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Wajib Pajak yang Dilayani	200 WP	Pelayanan pembayaran dan konsultasi pajak daerah

												Penatausahaan dokumen pajak daerah
									Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Prosentase Potensi Pajak	1%	Sosialisasi kepada wajib pajak tentang pajak daerah
												uji petik objek wajib pajak daerah
												Kajian penetapan besaran tarif pajak reklame
												Pemeliharaan aplikasi pajak daerah
									Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	12	Rekon Pendapatan
									Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1	
									Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	3	
									Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	2	
					100%	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah berkas Pemutakhiran dan Pelayanan PBB&BPHTB yang diselesaikan	3900. OP	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah berkas Pemutakhiran dan Pelayanan PBB&BPHTB yang diselesaikan	3900. OP	1. Pemutakhiran PBB melalui RT/RW
			Peningkatan Penerimaan PBB dan BPHTB	% Persentase Peningkatan Penerimaan PBB dan BPHTB	3.1%	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah SPPT PBB yang ditetapkan dan diterbitkan	78.000 SPPT	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah SPPT PBB yang ditetapkan dan diterbitkan	78.000 SPPT	1. Penetapan dan Cetak Massal SPPT PBB
												2. Penyerahan SPPT PBB kepada Petugas Pemilah di Kelurahan
												3. Penyusunan dokumen laporan cetak massal SPPT PBB
							Jumlah obyek/subyek PBB (dalam formulir SPOP/LSPOP) yang dimutakhirkan data digital dan	4000 formulir SPOP /LSPOP		Jumlah obyek/subyek PBB (dalam formulir SPOP/LSPOP) yang dimutakhirkan data digital dan spasialnya	4000 Formulir SPOP/LSPOP	1. pelaksanaan perekaman data digital (SISMIOP/ basis data PBB) atas perubahan data obyek dan subyek pajak
												2. menyusun berita acara perekaman data
												3. menyusun rekapitulasi hasil perekaman data

							spasialnya					4. pelaksanaan perekaman data spasial (SIG PBB) atas perubahan peta blok
												5. menyusun rekapitulasi hasil perekaman data spasial
						Penagihan Pajak Daerah	Laporan Hasil Kesesuaian data pembayaran PBB dan BPHTB	59.848 Data	Penagihan Pajak Daerah	Laporan Hasil Kesesuaian data pembayaran PBB dan BPHTB		1. Melakukan rekonsiliasi elektronik harian atas penerimaan PBB dan BPHTB
												2. Menyusun rekapitulasi penerimaan PBB dan BPHTB hasil rekonsiliasi elektronik
							Laporan Realisasi Penerimaan PBB dan BPHTB	12 dokumen		Laporan Realisasi Penerimaan PBB dan BPHTB		1. Melakukan pemungutan PBB se Kota Probolinggo
												2. Melaksanakan kegiatan Road Show Pembayaran PBB
												3. Melaksanakan kegiatan rekonsiliasi realisasi PBB dan BPHTB dengan pemungut dan PPAT
						Pengelolaan Pendapatan Daerah	Laporan Hasil Rekonsiliasi SPPT PBB yang terdistribusikan dan terbayar PBB nya	1 dokumen	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Laporan Hasil Rekonsiliasi SPPT PBB yang terdistribusikan dan terbayar PBB nya		1. Sosialisasi pendistribusian SPPT kepada RT dan RW
												2. Melaksanakan monitoring pendistribusian SPPT PBB
												3. Melakukan rekonsiliasi pendistribusian SPPT PBB
						Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	3	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	3	Rekon Pengelolaan Retribusi Daerah
						Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	2	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	2	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	sentase capaian kinerja Kegiat	95%	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Presentase Capaian kinerja Kegiatan Minimal 80%	5 Dokumen	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	1. Penyusunan Rankhir RENSTRA 2025-2026
												2. Penyusunan Renja Perubahan 2026
												3. Penyusunan Renja 2026
												4. Penyusunan RKA P 2026
												5. Penyusunan RKA 2026
				Penyusunan laporan Capaian Kinerja SKPD	100%	Capaian dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Hasi Koordinasi dan Ikhtisar Kinerja SKPD	7. Dokumen	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capain Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Capain Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Dan Ikhtisar	7. Laporan	1. Penyusunan LPPD
												2. Penyusunan LKjIP
												3. Penyusunan data LKPJ
												4. Penyusunan data Lap SDGs

											Kinerja SKPD	5. Penyusunan SKM 6. Evaluasi RKPD 7. Penyusunan Profil SKPD

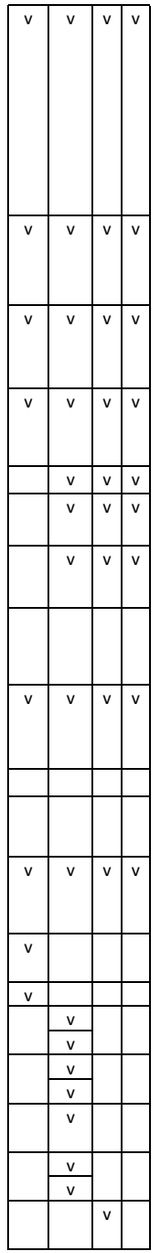
KEPALA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN
DAN ASET DAERAH
KOTA PROBOLINGGO

PUJO AGUNG SATRIO, S,STP.,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19780927 199802 1 001

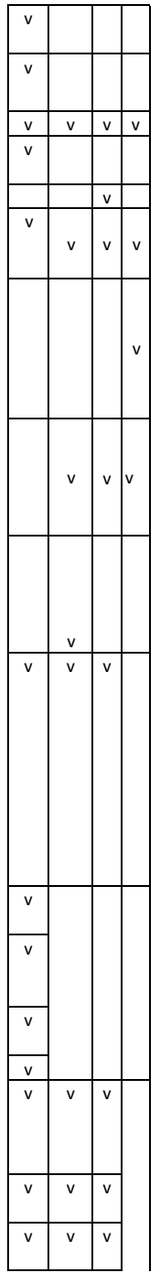
I	II	III	IV
	v	v	v
v	v	v	v
	v		v
v	v	v	v
v	v	v	v
v	v	v	v
v	v		
v	v	v	
		v	v
		v	v
v	v	v	v
v	v	v	v
v	v	v	v
v	v	v	v
v	v	v	v

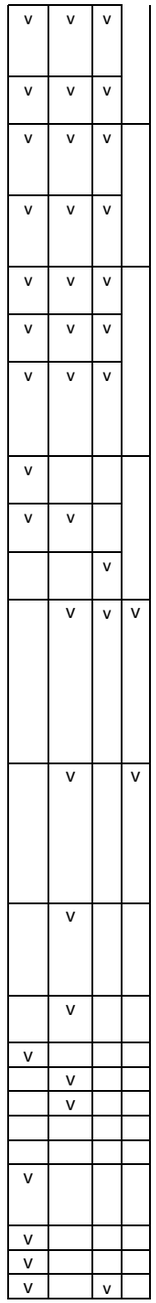
v	v	v	v
v	v	v	v
v	v	v	v
		v	v
		V	V
	V	V	
V	V	V	V
√	√	√	√
√	√	√	√

√	√	√	√
√			√
√			
√			
v	v		
	v		
	v		
	v		
		v	v
v	v	v	v



									>	>	>		>		>		>			>	>	>	
>					>	>	>	>	>	>	>				>					>	>	>	
	>	>	>	>	>					>	>	>		>		>		>			>	>	>	
										>	>	>				>					>	>	>	>





	v		v
	v	v	v
			v

KEUANGAN